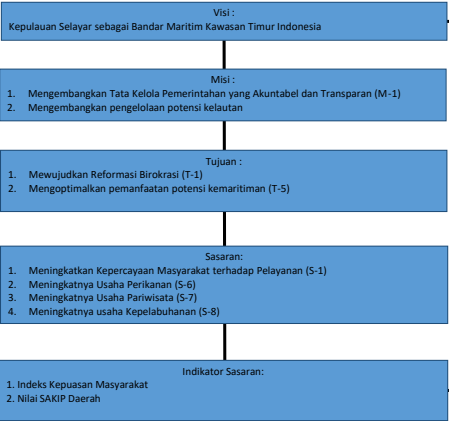
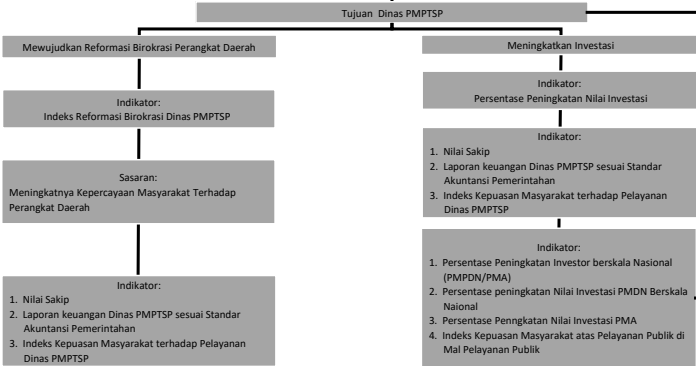


POHON KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024



Kepala Daerah



ESALON II (SKPD)

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

ESALON III (SKPD)

Indikator :
Persentase Capaian Kinerja

Indikator :
Persentase potensi untuk peluang Investasi Daerah

Indikator :
Jumlah Investor PMDN/PMA

Indikator:
Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) Juta Rupiah

Indikator :
Persentase Izin yang Diterbitkan

Indikator:
Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi

- Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Indikator :
1. Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu
 2. Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
 3. Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu
 4. Persentase ASN yang memiliki predikta kinerja sangan baik
 5. Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah
 6. Persentase ketersediaan BMD
 7. Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 8. Persentase BMD dalm kondisi baik

- Kegiatan :
1. Penempatan Pemberian Fasilitas /Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

- Indikator :
1. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

- Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Indikator :
1. Jumlah Investor PMA/PMPDN

- Kegiatan :
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota

- Indikator :
1. Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Juta Rupiah

- Kegiatan :
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanam Modal ymag menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota

- Indikator :
1. Persentase izin yang diterbitkan

- Kegiatan :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota

- Indikator :
1. Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima

- Sub Kegiatan :
- 1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Pebuhan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.6. Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2.2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 2.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - 2.4. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
 - 3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3.2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 3.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - 4.1. peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
 - 4.2. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - 5.1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 5.2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 5.3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 6.1. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 6.2. Pengadaan mebel
 - 6.3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 7.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 7.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 8.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan kendaraan dinas atau operasional lapangan
 - 8.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 8.3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - 8.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak. Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Indikator Sub Kegiatan
- 1.1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.2. Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun
 - 1.3. Jumlah Dokumen RKA perubahan yang tersusun
 - 1.4. Jumlah Dokumen DPA pokok yang tersusun
 - 1.5. Jumlah Dokumen DPA perubahan yang tersusun
 - 1.6. Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan
 - Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2.1. Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan
 - 2.2. Jumlah laporan keuangan akhir tahun
 - 2.3. Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran yang tersedia
 - 2.4. Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisas anggaran
 - 3.1. Jumlah rencana kebutuhan Barang milik Daerah (Dokumen)
 - 3.2. Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3.3. Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - 4.1. jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
 - 4.2. jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)
 - 5.1. Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
 - 5.2. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan
 - 5.3. Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 6.1. jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan
 - 6.2. jumlah paket mebel yang disediakan
 - 6.3. jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
 - 7.1. jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
 - 7.2. jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
 - 8.1. jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang pemelihara, pajak, dan Perizinannya
 - 8.2. Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara
 - 8.3. Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara
 - 8.4. Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya

- Sub Kegiatan :
- 1.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota
 - 1.2. Evaluasi pelaksanaan pemberin fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal

- Indikator Sub Kegiatan :
- 1.1. Jumlah peraturan daerah/provinsi dalm pemberan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - 1.2. Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang meperoleh insentif dan kemudahan berusaha daerah

- Sub Kegiatan :
- 1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- Indikator Sub Kegiatan :
- 1.1. Jumlah dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan :
- 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Indikator Sub Kegiatan :
- 1.1. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 1.2. Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha dari pelaku usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Benteng, Januari 2024
Kepala Dinas PMPTSP

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

- Sub Kegiatan :
- 1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 1.2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 1.3. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
 - 1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

- Indikator Sub Kegiatan :
- 1.1. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 1.2. Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 1.3. Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
 - 1.4. Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

- Sub Kegiatan :
- 1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Idikator Sub Kegiatan :
- 1.1. Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan

ESALON IV (SKPD)